



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

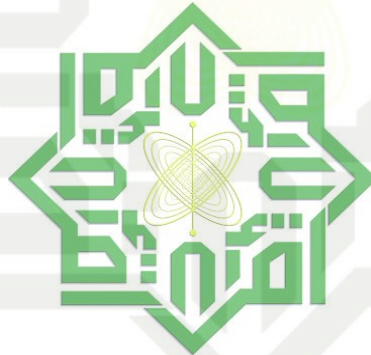
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN.

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH

M. FATCHULIL ZAENI

11627103787

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASYIM

RIAU

1441 H /2020 M

PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS STRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN.**

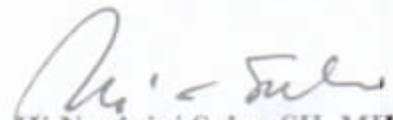
Tanggal Ditulis Oleh:

NAMA : M.FATCHULIL ZAENI
NIM : 11627103787
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Februari 2020

Pembimbing Skripsi


Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH
NIP: 195907111995032001

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN"* yang ditulis oleh :

Nama : M.FATCHULIL ZAENI
 NIM : 11627103787
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

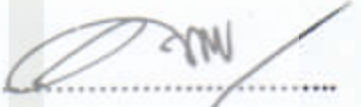
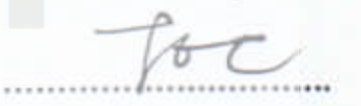
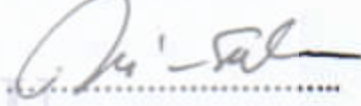

Pekanbaru, 16 Maret 2020 M
 TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Dr. H. Maghfiroh, MA


Sekretaris
 Joni Alizon, SH., MH

Penguji I
 Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
 H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


 Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Infrastruktur Pembangunan Desa Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Efektivitas infrastruktur pembangunan Desa menurut Permendagri nomor 114 tahun 2014 pembangunan infrastruktur Desa harus memberi manfaat dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut masyarakat Desa Mayang Sari mereka mengatakan bahwa selama ini pembangunan infrastruktur desa tidak efektif dan terkesan hanya menghabiskan anggaran yang ada.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap efektivitas infrastruktur Pembangunan Desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, serta Bagaimana faktor penghambat efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya efektivitas pembangunan infrastruktur masih dapat terbilang tidak optimal, ini dapat dilihat dari tidak efektifnya suatu bangunan. Faktor-faktor penghambat efektivitas infrastruktur pembangunan desa yaitu kurangnya kematangan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim.....

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Infrastruktur Pembangunan Desa Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Tukimin dan ibunda Halimah serta keempat saudara penulis Asih Kunanti Murti, Ardi Imam Yulianto, S.P., Maskuron, Siti Nurjanatunaim yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag Selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Firdaus, SH,MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Ibu Muslim, S.Ag., SH., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UIN Suska Riau.
5. Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH, MH. Selaku pembimbing penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya

Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.....

Pekanbaru, 20 Januari 2020

Penulis,

M. FATCHULIL ZAENI
Nim : 11627103787

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa	14
B. Visi dan Misi Desa	16
C. Struktur Organisasi Kantor Desa.....	17
D. Kondisi Geografis dan Demografis	17
BAB III: TINJAUAN TEORI	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	25
B. Pengertian Efektivitas	26
C. Konsep Pembangunan.....	29
D. Infrastruktur Desa	39
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Infrastruktur Pembangunan Desa Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	50
---	----

BAB V:

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unsur yang penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia keadaan tersebut tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan ke dalam undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam negara yang bersifat istimewa.

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara definisi desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹

Pengaturan tentang desa didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diatur di dalam pasal 1 dan pasal 93-111 berbunyi “ Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

¹ Ateng Syafrudin, *Republik Desa, pergaulan hukum tradisional dan hukum modren dalam desain otonomi desa*, (Bandung: Alumni), h. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan berada di daerah kabupaten”.

Kemudian didalam kewenangannya desa berhak melakukan kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dimasa reformasi memberikan hak terhadap desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di tingkat desa. Namun dalam tugas dan kebijakannya, desa masih harus berada dalam pengawasan pemerintahan kabupaten.²

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggara otonomi daerah sehingga disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa “ yang menjelaskan tentang bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakat dan peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hal ini di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU Desa adalah tugas setiap warga

² B.N. Marbu, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, (jakarta: Sinar harapan,2010), h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang di ada dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Selain itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerintahan, pemberdayaan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus memiliki perencanaan, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Rencana merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan tersebut berisi tindakan yang akan dilakukan pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan daerah tidak berhenti di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, tetapi hingga tingkat desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Pembangunan desa merupakan bagian dari integritas dari pembangunan daerah dan nasional yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintahan. Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat oleh sebab itu, perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dengan baik dan efektif sehingga memberikan manfaat dan kemajuan bagi masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akan tetapi tingkat efektivitas dari pembangunan masih belum teruji manfaatnya karena infrastruktur yang dibangun masih ada yang belum dapat difungsikan secara tepat. Hal ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat hasil dari pembangunan tersebut. Efektivitas dari sebuah pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung.

Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa). RPJM desa ini nantinya akan menjadi acuan pemerintahan pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja pemerintahan desa (RKP desa). Salah satu yang mendorong pencapaian kesuksesan pembangunan desa ialah baik tidaknya RPJM desa. RPJM desa yang baik sudah seharusnya tidak bertentangan atau disusun sesuai dengan regulasi yang ada, RPJM desa sebagai dokumen yang dijadikan acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya harus sesuai dengan peraturan Pemerintahan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Pada pasal 88 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJM desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015³ dan untuk selanjutnya harus disesuaikan dengan Permendagri tersebut. Namun, faktanya hingga akhir tahun 2016 masih banyak desa yang belum

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Pasal .88 (Jakarta: dokumen salinan, 2014), h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelesaikan RPJM desa dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014. Pada umumnya, desa-desa tersebut masih mengacu pada Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa.

Pembangunan infrastruktur desa juga merupakan salah satu penunjang kemakmuran desa sehingga diharapkan dengan adanya pembangan infrastruktur desa yang memiliki manfaat dapat mempermudah masyarakat setempat naman dalam kenyataannya masyarakat desa Mayang Sari banyak mengeluhkan soal pembangunan yang ada di desa mereka hanya menjadi bangunan tua yang tidak memiliki manfaat sehingga masyarakat berpendapat pemerintahan desa hanya menghambur-hamburkan dana yang ada.

Memperhatikan hal-hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah Proposal yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Infrastruktur Pembangunan Desa Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya peneltian ini, karena terbatasnya waktu dan tempat maka penulis membatasi permasalahan tersebut yakni hanya pada penerapan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dilihat dari Efektivitas Infrastruktur Pembangunan di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian yang utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap efektivitas infrastruktur Pembangunan Desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?
2. Apakah faktor penghambat terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur Desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui Tinjauan yuridis terhadap efektivitas infrastruktur Pembangunan Desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur Desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Supaya terwujudnya efektivitas infrastruktur Pembangunan di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum fakultas syariah dan hukum Unifersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode kualitatif adalah metode naturalistik dikarnakan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural setting*)⁴ dengan langsung datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) dan memeperoleh data melalui tanya jawab (wawancara).

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu menguraikan semua data yang telah terkumpul, baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitis. Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mesndapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian yang satu dengan pengertian lainnya untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya. Dengan mendeskripsikan dan menfsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkanaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian

⁴ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Obejek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah perangkat kantor desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan Masyarakat Setempat di desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan lesung Kabupaten.

Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah terhadap efektivitas infrastruktur pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

3. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliatan yang berkaitan terhadap efektivitas infrastruktur pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sebagai penelitian disebabkan di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan terdapat sistem pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 sehingga adanya pembangunan yang kurang efektif dapat meresahkan warga dan merugikan masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang perangkat kantor desa dan 1853 masyarakat desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penulis mengambil sampel 6 Masyarakat desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yakni dengan teknik *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

Tabel. 1.1

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Desa Mayang Sari	1 Orang	1 Orang	100 %
2.	Kaur Perencanaan	1 Orang	1 Orang	100 %
3.	Kepala Dusun III	1 Orang	1 Orang	100 %
4.	Masyarakat	1853 Orang	6 Orang	0,3%
Jumlah			9 Orang	

Sumber : Data Olahan/Lapangan, 2019

5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian hukum lapangan, dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data:

⁵ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer, yaitu data utama penulis peroleh dari para pegawai kantor desa dan masyarakat di desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
- b. Data Sekunder, data pendukung yang penulis peroleh dari sumber referensi, berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber lainnya seperti dari masyarakat atau para pegawai kantor desa
- c. Data Tersier, data-data tambahan sebagai pelengkap pembahasan guna memperluas dan memperdalam pembahasan seperti Undang-undang Dasar, Permendagri Nomor 114 tahun 2014, Al-Qur'an dan terjemahannya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengamatan menurut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya⁶. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan peninjauan pada bentuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman

⁶ Muhamad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet-1, Edisi 1, h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa di desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

- b. Wawancara, yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data⁷. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada para perangkat kantor desa dan Masyarakat desa Mayang Sari dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung serta fokus permasalahan, sehingga data-data tersebut dapat terkumpul semaksimal mungkin.
- c. Studi Kepustakaan, peneliti mencari data dari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan tinjauan yuridis terhadap efektivitas pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014, Undang-Undang, makalah-makalah, skripsi-skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti

⁷ *Ibid*, h. 151



F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian: keadaan geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi masyarakat, dan adat istiadat

BAB III: TINJAUAN TEORI

Bab ini membahas tentang tinjauan teori berkenaan dengan pengertian efektivitas, infrastruktur pembangunan, tujuan pembangunan, manfaat pembangunan, kegunaan Pembangunan, landasan hukum menurut Undang-Undang dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menjelaskan Tinjauan yuridis terhadap efektivitas infrastruktur Pembangunan Desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan apakah faktor penghambat terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

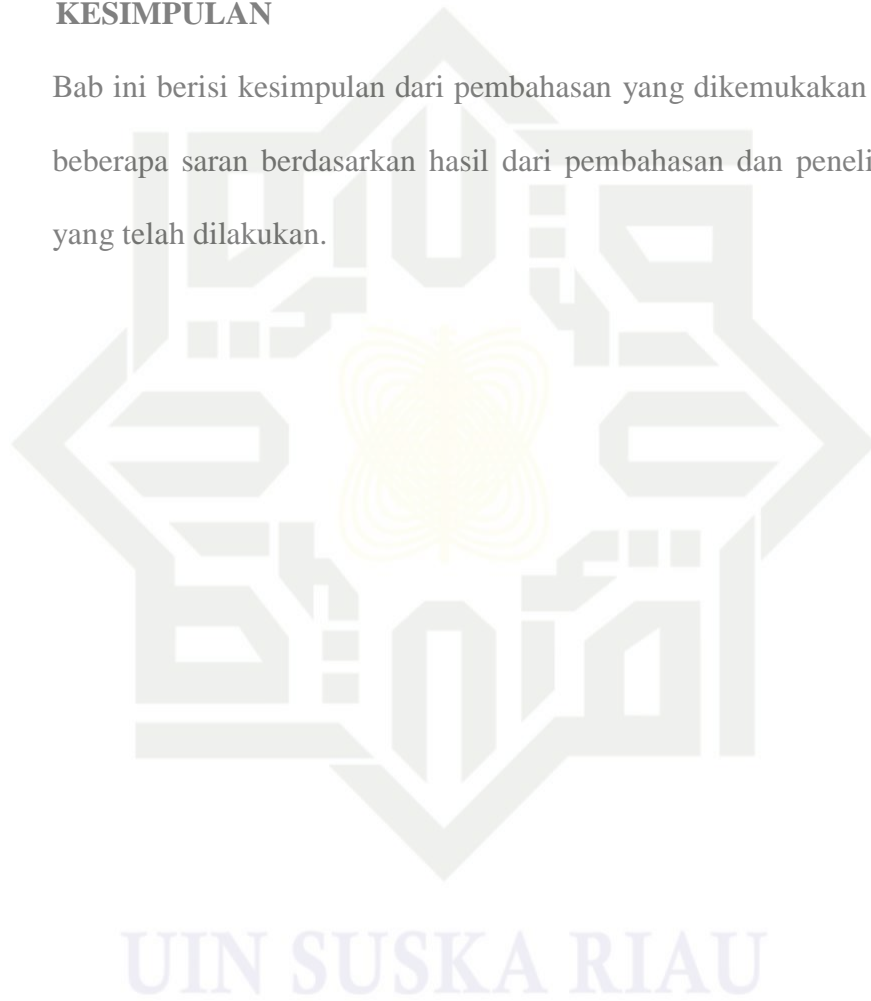
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V:

pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
 Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten
 Pelalawan

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dikemukakan dan beberapa saran berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

1. Berdirinya Desa

Desa mayang sari berdiri pada tahun 1989, pada tahun inilah desa tersebut mulai ditempati penduduk. Desa ini merupakan pemukiman transmigrasi yang pengelolannya ditangani oleh Dinas Transmigrasi dan PT. Sari Lembah Subur sebagai bapak angkat yang merupakan pengelola lahan dan kebun warga. Penduduk pada umumnya berasal dari pulau jawa dan sebagaian dari daerah lokal tempatan.

2. Asal Usul Desa

Desa Mayang Sari merupakan desa eks transmigrasi yang asal muasalnya adalah satuan pemukiman 9B (SP. 9B) yang merupakan bagian wilayah kerja untuk memudahkan administrasi bagi Departemen Transmigrasi dan Pihak Pengelola yaitu PT. Sari Lembah Subur.

Pada Tahun 1989 tepatnya Bulan Desember, SP 9B baru mulai ditempati penduduk warga transmigrasi 70 % penduduk dari pulau Jawa dan 30 % berasal dari penduduk asli tempatan. Desa ini dipimpin oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dan beberapa Staf sebagai pembina untuk menuju desa mandiri yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 1992 Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi mengadakan rembuk Desa dengan tokoh masyarakat untuk membentuk susunan pemerintahan desa, yang fungsinya untuk membantu tugas-tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUPT dalam pembinaan warganya. Dan pada tahun ini juga KUPT, Tokoh Masyarakat mengadakan Pemilihan Pjs Kepala Desa. Kepala Desa terpilih adalah Bapak SUPIJA BA, pada tahun ini juga Struktur Pemerintahan dibentuk (Kaur, Kadus, RW, RT).

Pendiri Desa

Pada tahun 1992 KUPT SP 9B Bapak RUSDI VERIZA dan Pjs Kepala Desa Bapak SUPIJA BA, bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama mengadakan rembuk desa yang tujuannya adalah untuk memberi nama Desa. Beberapa nama telah diajukan dan dengan kesepakatan bersama terpilih nama “MAYANG SARI” sebagai nama desa. Dan sampai dengan saat ini Desa Mayang Sari sudah pernah dipimpin oleh beberapa orang Kepala Desa yaitu Pada tahun 1992 **SUPIJA, BA** menjabat Pjs Kepala Desa sampai tahun 1994, dan pada Tahun 1995 Bapak SUPIJA, BA dilantik sebagai Kepala Desa Devenitif sampai tahun 2004 dan MUSTAQIM, MZ Sebagai Sekretaris Desa kemudian Desa Mayang sari terus berkembang dengan Kepala Desa: Tahun (2005-2011) **SUKATNO** (Kepala Desa) dan JUNAIDI sebagai Sekdes, Tahun (2011-2017) **PUJI MUSTOFA** (Kepala Desa) dan JUNAIDI sebagai sekdes, tahun (2017-2018) Bapak **RUSDIYANTO S.Kep** dilantik sebagai Pjs Kepala Desa Mayang Sari dan Bapak JUNAIDI sebagai Sekretaris Desa, kemudian ditahun (2018-sekarang) Bapak **BAMBANG ALI WAHYUDI** menjabat sebagai Kepala Desa Mayang Sari dan JUNAIDI sebagai Sekretaris Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Visi dan Misi

Visi Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan adalah ***Berdikari, Inovatif, sejahtera, dan adil.agamis, mandiri, aman dan harmonis.*** Sedangkan Misi Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

- a) Bersama masyarakat dan kelembagaan Meningkatkan profesionalisme pelayanan Publik.
- b) Bersama masyarakat dan kelembagaan Meningkatkan pembangunan Fisik dan Non Fisik diberbagai Bidang.
- c) Bersama masyarakat dan kelembagaan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastrukt

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

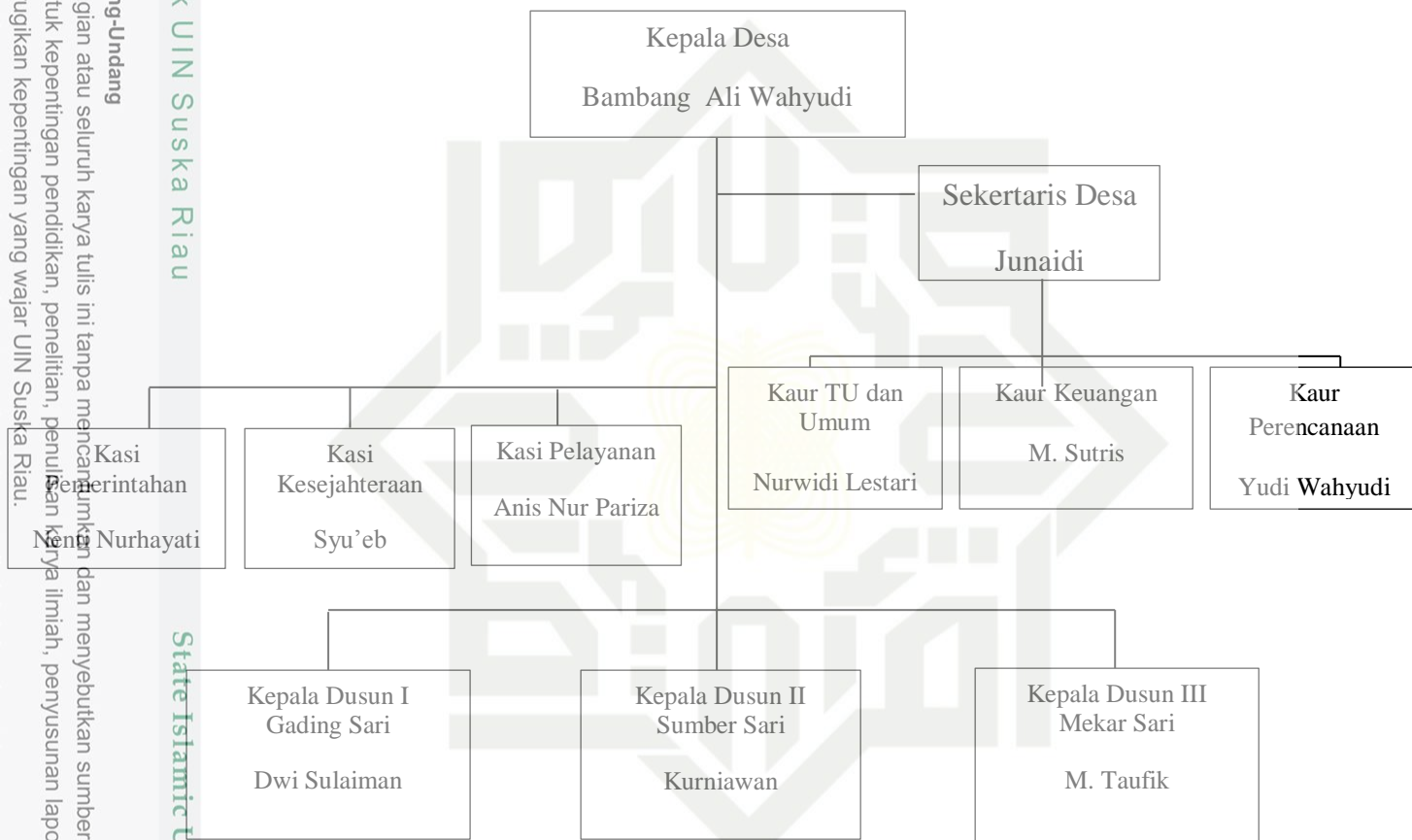
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa

Skema Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa



Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

D. Geografis

Desa Mayang Sari adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang mempunyai luas 1.020 Ha yang dibagi menjadi 3 Dusun, 9 Rukun Warga dan 13 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 1.853 jiwa yang terdiri dari 539 Kepala Keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah Desa Mayang Sari adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.1
Batas Desa

NO	Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Sari Mulya	Pangkalan Lesung
2	Sebelah Selatan	Desa Genduang	Pengkalan Lesung
3	Sebelah Timur	Desa Sari Mulya	Pangkalan Lesung
4	Sebelah Barat	Desa Genduang	Pangkalan lesung

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

E. Demografis

1. Penduduk

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh aparat Pemerintah Desa Mayang Sari mengenai kondisi penduduk, bahwa Desa Mayang Sari berjumlah 1.853 jiwa yang terdiri dari 539 Kepala Keluarga (KK), adapun jumlah penduduk Desa Mayang Sari berdasarkan jenis kelamin dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Penduduk Desa Mayang Sari Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1	Laki-laki	970 Jiwa	52,35%
2	Perempuan	883 Jiwa	47,65%
Jumlah		1.853 Jiwa	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 1.853 jiwa penduduk Desa Mayang Sari, jenis kelamin laki-laki lebih besar dari pada jenis kelamin perempuan, yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 970 jiwa atau 52,35%, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 883 jiwa atau 47,65%.

2. Keagamaan

Memeluk agama adalah hak asasi dasar daripada manusia, kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampuradukan kepercayaan.

Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh Falsafah Negara Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah :

- a) Kerukunan umat beragama dengan seagama
- b) Kerukunan umat beragama dengan agama lain
- c) Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syari'at agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Sebab apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai keagamaan, maka masyarakat tersebut akan cepat mendukung perbuatan itu, maka sanksi akan diberikan pemuka adat dengan sanksi sosial yang tidak bertentangan dengan agama.

Desa Mayang Sari terdapat dua jenis agama tetapi mereka dapat hidup dalam keadaan damai dengan kerukunan keagamaan, mayoritas Desa Mayang Sari dihuni oleh masyarakat muslim. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 2.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Jenis Agama	Jumlah	Persen
1	Islam	1.849 Jiwa	99,78%
2	Kristen	4 Jiwa	0,22%
Jumlah		1.853 Jiwa	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Mayang Sari mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah 1.849 orang atau 99,78%, sedangkan agama Kristen hanya berjumlah 4 orang atau 0.22 % sehingga agama Kristen menjadi agama minoritas yang dianut penduduk Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun infrastruktur berupa tempat peribadahan perlu didukung oleh sarana dan prasarana, banyaknya tempat peribadahan di Desa Mayang Sari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.4.
Jumlah Infrastruktur Tempat Peribadahan Desa Mayang Sari

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah	Persen
1	Masjid	3	21,43%
2	Mushallah	11	78,57%
3	Gereja	-	-
	Jumlah	14	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 dari 3 tempat rumah ibadah penduduk Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yaitu Masjid yang berjumlah 3 unit dan Mushallah berjumlah 11 unit atau 78,57%, sedangkan jenis tempat peribadatan agama kristen belum ada di Desa Mayang Sari.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan peranan penting dalam memberdayakan masyarakat. Pendidikan juga merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perseorangan maupun dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh pendidikan.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara (pasal 31 ayat 1 UUD 1945).

Apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju kearah industrialisasi jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau kemampuan atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Tabel. 2.5.
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mayang Sari

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Belum Sekolah	230	
2	Tidak Tamat SD	51	
3	Tamat TK	196	
4	Tamat SD/MI	706	
5	Tamat SMP/MTS	291	
6	Tamat SMA/MA	304	
7	Akademi/Perguruan Tinggi	75	
Jumlah		1.853	

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Mayang Sari menurut tingkat pendidikan paling banyak adalah tamatan SD yaitu berjumlah 706 Jiwa atau 38,10 % dari 1.853 jiwa penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana pendidikan yang terdapat di daerah Desa Mayang Sari cukup memadai, sarana pendidikan ini sangat menunjang bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi lagi. Untuk mengetahui secara konkrit keberadaan sarana pendidikan yang ada di Desa Mayang Sari, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 2.6.
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Mayang Sari

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persen
1	PAUD	1	20%
2	Taman Kanak-kanak	1	20%
3	Sekolah Dasar	1	20%
4	MDA	1	20%
5	Sekolah Menengah Pertama	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sudah memadai dengan adanya gedung-gedung sekolah yang telah dibangun oleh pemerintah dapat dilihat dalam penelitian ini jumlah gedung PAUD di Desa Mayang Sari ada 1 atau 20%, gedung Sekolah Dasar (SD) ada 1 atau 20%, gedung MDA ada 1 tau 20% dan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 1 atau 20%. Ini sudah menunjukkan bagaimana keadaan pendidikan di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

4. Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melakukan berbagai macam usaha sebagai mata pencaharian utama, yaitu sebagai petani, peternak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nelayan, pedagang, PNS, tukang, guru, bidan/perawat, TNI/Polri, pensiunan, sopir/angkutan, buruh, jasa persewaan dan swasta.

Adapun bentuk mata pencaharian penduduk yang ada di Desa Mayang Sari mayoritas mata pencahariannya penduduk adalah petani dan buruh. Untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian Desa Mayang Sari dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel. 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persen
1	Petani	1200	
2	Peternak	10	
3	Nelayan	-	-
4	Pedagang	30	
5	PNS	35	
6	Tukang	3	
7	Guru	44	
8	Bidan/perawat	7	
9	TNI/Polri	-	-
10	Pensiunan	-	-
11	Sopir/angkutan	15	
12	Buruh	392	
13	Jasa Persewaan		
14	Swasta	-	-
15	Wirausaha	80	
15	Lain-lain/tidak tetap	37	
	Jumlah	1.853	

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada umumnya adalah petani, baik itu petani sawah/ladang, petani sawit, dan sebagainya dengan jumlah 1200 jiwa atau dengan 64,76 %. Dan mata pencaharian yang menjadi minoritas di Desa Mayang Sari adalah bidan dengan jumlah 7 jiwa atau 0,38%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Mayang Sari terdiri dari beberapa suku Jawa, Melayu, Sunda. Mayoritas masyarakat Desa Mayang Sari adalah suku Jawa. Sedangkan suku pendatang adalah suku minang dan batak. Kelima suku ini mewarnai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan tetap menjaga adat istiadat masing-masing suku serta menghormati adat masing-masing suku yang dianut setiap golongan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel. 2.8.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Persen
1	Jawa	1.598	
2	Melayu	150	
3	Sunda	100	
4	Minang	4	
5	Batak	1	
Jumlah		1.853	

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Mayang Sari, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas suku yang dianut masyarakat Desa Mayang Sari adalah suku Jawa yang berjumlah 1.598 jiwa atau 86,24% kemudian disusul oleh suku Melayu yang berjumlah 150 jiwa atau 7,85% yang dianut masyarakat Desa Mayang Sari. Diperingkat ketiga ada suku Sunda yang dianut masyarakat yang berjumlah 100 jiwa atau 5,23%, kemudian di posisi keempat masyarakat menganut suku Minang yang berjumlah 4 jiwa atau 0,21%, dan suku yang menjadi minoritas adalah suku Batak yang berjumlah 1 jiwa atau 0,05%



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti.⁸ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintahan. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku.⁹ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya. Baik berupa peraturan-peraturan kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹⁰

⁸ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h.

⁹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 83.

B. Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan dana yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.¹¹

Efektivitas menurut pengertian lain ialah tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut pengertian tersebut efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan secara matang.

Kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampilkan kegiatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasannya efektivitas sebagai ketepatan harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai, sehingga kegiatan dikatakan tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai.¹²

¹¹ Soewarno Handyaningrat, *Landasan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintahan Daerah Kota dan Desa*, (Jakarta: tp, 1986), h. 67.

¹² Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada implementasi efektivitas biasanya diturunkan melalui program-program, karena pada dasarnya program merupakan tuntunan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau formulasi kebijakan, pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Tepat Kebijakan (Apakah kebijakan sudah tepat)

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi pertama kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan, sisi kedua adalah apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

- b. Tepat Pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidak hanyalah pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri berskala menengah atau kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c. Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal. Pertama apakah target yang diintervensikan sudah sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulangi kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.¹³

d. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan yakni interaksi di antara lembaga perumusan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Terfokus pada lembaga-lembaga yang ada di desa itu sendiri.

¹³ Iwan Nugroho, *Implementasi Pembangunan Wilayah*, (Malang: Universitas Widyagama Malang, 2008), h. 650.

e. Tepat Proses

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pelaksanaan sesuai dengan SOP kebijakan pembangunan desa itu sendiri.¹⁴

C. Konsep Pembangunan

Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali dengan kebijaksanaan pembangunan, pada kebijakan pembangunan haruslah mentaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran dan seluruh rencana pembangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah.

Pembangunan sebagai proses perubahan yang dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal dan eksternal. Disamping itu, sebuah proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tindakan perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumber daya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam mengelolanya diantara tiga *stakeholders* pembangunan yaitu negara, masyarakat dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut yaitu tingkat lokal, regional atau nasional.¹⁵

Adapun pendapat lain tentang pembangunan dikemukakan oleh Rogers, yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial,

¹⁴ *Ibid*, h.

¹⁵ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sedangkan modernisasi menunjuk pada level individu. Yang paling sering, jika kedua pengertian tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi atau lebih mencakup seluruh proses analogi dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat yang rendah, pengangguran dan ketidakadilan sosial.¹⁶

a. Pengertian Pembangunan

Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi, untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas karena stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap tahunnya.¹⁷

Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktural sosial, sikap-sikap

¹⁶ Nasution Zulkarimen, *Komunikasi Pembangunan : Pengenalan Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

¹⁷ Abdul Gaffar Karim, *Persoalan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan istitusi-institusi nasional, disamping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.¹⁸ Sedangkan menurut Rogers dalam Buku Risma Handayani, pembangunan adalah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam mencapai kemajuan sosial dan meterial (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.¹⁹

Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*), dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*Proferty*), kerusakan (*descruction*), tekanan (*repression*) dan aliansi (*alientation*).²⁰

b. Pembangunan Desa

Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

¹⁸ Tandoro, M.P, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ke Tiga Terjemah dari Haris.M*, (Jakarta: Erlangg, 1992), h.

¹⁹ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makasar: Alaudiin Universitas Press, 2014), h. 12.

²⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana Prernada Media Group, 2013), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²¹

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintahan terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.²²

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Solekhan mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintahan di suatu pihak.²³

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metod sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

²¹ UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

²² Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), h. 46.

²³ *Ibid*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperlihatkan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan yang mereka miliki, pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasilnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
3. Sebagai suatu program, yaitu berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin yang perhatiannya ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen pemerintahan daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun bawahan serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan di dalam pembangunan pedesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan atau tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasma.

Disisi lain, masalah rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan dan rendahnya SDM di pedesaan yang sebagai besar berketerampilan rendahnya (*low skiiked*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintasan bidang pembangunan kawasan pedesaan.

²⁴ Ibid, h. 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai penuntun penyelenggaraan pembangunan desa disusun panduan penyelenggaraan pembangunan desa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Sebagai berikut:

c. Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa dimulai dengan tahapan perencanaan pembangunan desa. Sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.²⁵

Pemikiran Supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson Tarigan yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu:²⁶

- a) Perencanaan berarti memilih
- b) Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya
- c) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
- d) Perencanaan berorientasi masa depan

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014

²⁶ Robinson Tarigan, *Perencanaan, Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perencanaan pembangunan desa, selain mempertimbangkan kondisi desa maka desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus bersifat jangka panjang. RPJM desa merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP desa.

Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

1. Pelaksanaan pembangunan desa

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Peringatan ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaan harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek terapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Hal ini sesuai arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pembangunan daerah dalam pembangunan.

2. Pengawasan Pembangunan Desa

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

d. Tujuan Pembangunan

Setiap bangsa membutuhkan pembangunan, ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Sementara kemajuan bidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan, namun unsur yang itu bukanlah satu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak semata-mata suatu fenomena ekonomi. Pada akhirnya, pembangunan menurut kita memutuskan perhatian pada hal-hal yang lebih dari pada sekedar sisi material dan finansial dari kehidupan manusia.²⁷ Oleh sebab itu, melalui pembangunan yang mengandung makna terjadinya gerakan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan pertumbuhan

²⁷ Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terencana dalam memaksimalkan tingkat kemakmuran masyarakat dimasa kini maupun masayang akan datang. Diyakini dapat mewujudkan kehidupan yang serba lebih baik. Kehidupan yang lebih baik dimaksud mengandung tiga tujuan yakni:

- 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- 2) Peningkatan standar hidup, tidak hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan jati diei pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- 3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.²⁸

²⁸ Nurman, Op.Cit, h. 87.



B. Infrastruktur Desa

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pengendalian air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk fasilitas tujuan-tujuan ekonomi.²⁹

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan dasar, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat, adapun kategori infrastruktur menurut Grigg sebagai berikut:

- a. Kategori infrastruktur
 - 1) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan)
 - 2) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara)
 - 3) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk irigasi)
 - 4) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat)

²⁹ Kodoetie R.J, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar
- 6) Kelompok produksi dan distribusi (listrik dan gas)³⁰

b. Jenis-jenis infrastruktur

1) Infrastruktur keras

Meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan dan saluran irigasi

2) Infrastruktur keras non-fisik

Berkaitan dengan fungsi fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi.

3) Infrastruktur lunak

Meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan).

Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu:

a) Jalan Desa

1. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten).

³⁰ *Ibid*, h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jaringan jalan lokal sekunder adalah jalan-jalan yang menghubungkan anantara lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal.
3. Jalan lingkungan adalah jalan-jalan yang menghubungkan anantara lingkungan atau gang-gang (kampung) dimana pada umumnya menghubungkan antara satuan pemukiman atau jalan masuk kemasing-masing lingkungan kecil yang ada di wilayah perencanaan.

b) Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawasan dengan ketentuan dan keuntungan anantara lain:

- a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu
- b. Jaringan pemipaan murah dapat diameter kecil
- c. Sistem sumbangan pada langgana setiap bulan dalam jumlah tetap
- d. Sistem operasional sederhana dan murah
- e. Kebutuhan akan tenaga tidak besar

c) Listrik

Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta terwujudkan pembangunan yang berkelanjutan.³¹

d) Rumah

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebgai besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik bangunan sendiri maupun sewa kepada pemilik lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat desa umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah.

e) Irigasi

Keberadaan jaringan irigasi sengatlah berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat, terlebih pada desa bersumber mata pencarian sebagai petani sawah.³²

³¹ UU Nomor 30 tahun 2009

³² Kodoetie R.J, Op.Cit, h.103



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa pembangunan di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menerangkan bahwasannya efektivitas pembangunan infrastruktur masih dapat dibilang tidak optimal, ini dapat dilihat dari tidak efektifnya suatu bangunan. Beberapa bangunan infrastruktur di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten pelalawan masih dikatakan kurang efektif khususnya dalam pembangunan jalan dan gedung yang masih dianggap sangat meresahkan masyarakat padahal anggaran desa harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat, harapan mereka dalam pembangunan infrastruktur jauh dari kenyataan.
2. Faktor utama yang menghambat pembangunan infrastruktur adalah faktor kurangnya kematangan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur serta faktor tata anggaran yang tidak sesuai rencana aplikatif sehingga pembangunan infrastruktur kurang berjalan dengan lancar dan berujung pada tidak efektifnya hasil yang dicapai, kemudian kurangnya komunikasi antara aparat desa dan masyarakat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. program pembangunan sehingga terjadinya ketidak sejalannya keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah desa. sehingga masyarakat tidak turun aktif dalam program-program pemerintah.

Faktor lainnya adalah keterbatasan anggaran dan pengambilan manfaat atau untung dari mereka pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong pembangunan infrastruktur desa membuat pembangunan yang seharusnya di perhitungkan cepat selesai bergeser mundur apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut tentunya masyarakat dapat menilai konstruksi bangunan dan ikut mengawasi jalannya pembangunan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari:

1. Pemerintah diharapkan memberi perhatian penuh terhadap pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan gedung yang masih sangat tidak memuaskan serta perlunya melibatkan masyarakat dalam perencanaannya dan prosesnya sehingga masyarakat dapat ikut bertanggung jawab dengan penuh kesadaran terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Serta menjadikan keluhan masyarakat sebagai PR demi tercapainya tujuan yang telah diharapkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Perlu adanya tata kelola anggaran dana desa yang transparan sehingga anggaran yang ada sesuai dengan peruntukannya. Kemudian diharapkan

masyarakat desa harus memiliki kesadaran bahwa infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah adalah milik masyarakat dan itu merupakan tanggung jawab bersama, karena infrastruktur yang disediakan pemerintah menggunakan uang rakyat, jika infrastruktur tersebut tidak dijaga maka kondisinya akan mudah rusak dan tidak terawat sehingga masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya. Namun jika infrastruktur dijaga dengan baik maka masyarakat sendiri yang mendapatkan untungnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, *Persoalan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>
- Iwan Nugroho, *Implementasi Pembangunan Wilayah*, (Malang: Universitas Widyagama Malang, 2008)
- Kodoetie R.J, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Marbu, B.N., *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, (jakarta: Sinar harapan, 2010)
- Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Intrans Publishing, 2014)
- Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Nasution Zulkarimen, *Komunikasi Pembangunan : Pengenalan Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Pasal .88* (Jakarta: dokumen salinan, 2014)
- Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makasar: Alaudiin Universitas Press, 2014)
- Robinson Tarigan, *Perencanaan, Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)
- Syafrudin, Ateng, *Republik Desa, pergaulan hukum tradisional dan hukum modren dalam desain otonomi desa*, (Bandung: Alumni)
- Soewarno Handyaningrat, *Landasan Pedoman Kerja Administrasi Pemeritahan Daerah Kota dan Desa*, (Jakarta: tp , 1986)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005)

Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Tandoro, M.P, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ke Tiga Terjemah dari Haris.M*, (Jakarta: Erlangg, 1992)

Teguh, Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet-1, Edisi 1

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 30 tahun 2009

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)

Zainal,Amiruddin ,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 18 maret 2020

Perihal : Surat permohonan

kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Suska Riau

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M.Fatchulil Zaeni

Jurusan/Semester : Ilmu Hukum/VIII

Tempat/Tanggal Lahir : Mayang Sari, 06 Oktober 1996

Alamat : Jl Kubang Raya

Lulus Munaqasyah : 09 Maret 2020

Judul :Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas
Infrastruktur Pembangunan Desa Menurut
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa
Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan.

Mengajukan permohonan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kelulusan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan:

1. Surat Keterangan Bebas Pustaka Universitas
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka Fakultas
3. Blanlo Penyerahan Skripsi
4. Surat Keterangan Jurnal Hukum Islam
5. Surat Pernyataan Tidak Plagiat

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya,

M.Fatchulil Zaeni
Nim:11627103787



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **MFATCHULIL ZAENI**
 NIM : **11627103787**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : **Senin, 09 Maret 2020**
 Waktu : **13.30 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Māghfiroh, MA

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email, admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: M. FATCHULIL ZAENI
: 11627103787
: ILMU HUKUM
: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS
INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT
PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG
SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN
PELALAWAN

Pembimbing : Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Art. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fatchulil Zaeni
NIM : 11627103787
Tempat/Tanggal Lahir : Mayang Sari, 06 Oktober 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN BESUNG KABUPATEN PELALAWAN"** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat pada : 19 Maret 2020

**METERAI
TEMPEL** pernyataan

10126A-HF338863340

M. FATCHULIL ZAENI
NIM. 11627103787



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diijaz mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS STRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN", ditulis oleh saudara :

Nama : M. FATCHULIL ZAENI

NIM : 11627103787

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 07 November 2019

Narasumber : Syafrinaldi, SH,MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
Kepala bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 18 November 2019

Narasumber

Erni, S. Os., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Syafrinaldi, SH..MA
NIP. 19810923 200604 1 004

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Hj. Nur'anin Sahu, SH.,MH., Dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

: Nota Dinas

: -

: Pengajuan Skripsi

Sdr. M.Fatchulil Zaeni

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara M.FATCHULIL ZAENI, yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Infrastruktur Pembangunan Desa Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, 18 Februari 2020

Pembimbing skripsi

Hj. Nur'aini Sahu, SH.,MH
NIP:195907111995032001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tualunadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/9391/2019

Pekanbaru, 25 November 2019

Biasa
I (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: M. fatchulil zaeni
NIM	: 11627103787
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kantor Desa Mayang Sari Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Pembangunan Desa Menurut Permendagri Nomor
114 Tahun 2014 Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0057

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/28195
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum – UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F. PP.00.9/9391/2019 Tanggal 25 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	M. FATCHULIL ZAENI
2. NIM / KTP	11627103787
3. Program Studi	ILMU HUKUM
4. Jenjang	S1
5. Alamat	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
7. Lokasi Penelitian	KANTOR DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPTSP/2019/0251

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28195 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

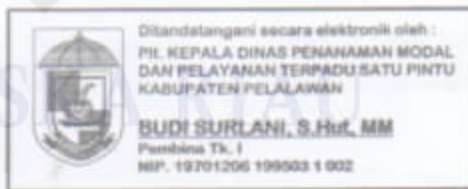
1. Nama : **MUHAMMAD FATCHULIL ZAENI**
2. NIK / KTP : 11627103787
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : DESA MAYANG SARI RT.004/RW.002 KEL.MAYANG SARI KEC.PANGKALAN LESUNG
6. Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
7. Lokasi Penelitian : KANTOR DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 23 Desember 2019



Temuan :

Kantor Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG DESA MAYANG SARI

Alamat : Jalur 4 Gading sari Desa Mayang sari Kec. Pangkalan Lesung

SURAT KETERANGAN Nomor : 470/Pem/XII/2019/555

Kepala Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : MUHAMAD FATCHULIL ZAENI
Tempat/Tanggal Lahir : Mayang Sari, 06 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 11627103787
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Nama tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan judul :

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 DI
DESA MAYANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN
PELALAWAN"**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan Di : Desa Mayang Sari
Pada Tanggal : 26 Desember 2019
KEPALA DESA MAYANG SARI


BAMBANG ALI WAHYUDI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



M.Fatchulil Zaeni, dilahirkan di Mayang Sari pada tanggal 06 Oktober 1996. Anak ke Lima dari Lima bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Tukimin dan Halimah, saat ini penulis tinggal di jalan Kubang Raya Perum Laura Land.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari :

1. SDN 007 Mayang Sari Lulus Tahun 2010
2. SMPN 3 Pangkalan Lesung Lulus Tahun 2013
3. SMAN 1 Pangkalan Lesung Lulus Tahun 2016

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gerbang Sari kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada tanggal 09 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Infrastruktur Pembangunan Desa Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan” dengan prediket Cumlaude.